

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial ekonomi utama di Indonesia yang bersifat multidimensional. Kondisi ini tidak hanya berkaitan dengan rendahnya tingkat pendapatan, tetapi juga mencerminkan keterbatasan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, serta layanan kesehatan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan di Indonesia memiliki karakteristik yang kompleks, sehingga penanganannya memerlukan pendekatan yang komprehensif, baik dari aspek sosial maupun ekonomi. Kompleksitas tersebut berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat serta terbatasnya akses terhadap berbagai sumber daya penting yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup. (Purwono, 2021)

QS. Adz-Dzariyat 19 :

 **وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ**

Artinya : *“Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta”*

Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan bahwa harta yang dimiliki seseorang tidak bersifat mutlak sebagai milik pribadi, melainkan di dalamnya terdapat hak orang lain, khususnya orang miskin. Ayat ini menegaskan pentingnya kepedulian sosial dan distribusi kekayaan secara adil, baik kepada mereka yang meminta maupun yang tidak meminta tetapi membutuhkan. Dengan demikian, Islam

mendorong terciptanya keseimbangan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat

Selain itu, konsep kesejahteraan dan kepedulian terhadap masyarakat miskin dalam Islam juga diperkuat oleh firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 177, yang menegaskan pentingnya nilai sosial dan distribusi harta kepada kelompok yang membutuhkan sebagai bagian dari implementasi keimanan dan keadilan sosial.

QS. Al-Baqarah(2) : 177

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ

Artinya:

“Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang yang dalam perjalanan, orang-orang yang meminta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya”

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa Islam sangat menekankan pentingnya kepedulian sosial dan tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok miskin dan lemah. Ayat ini menunjukkan bahwa harta tidak hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, tetapi juga harus didistribusikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan sebagai bentuk keadilan sosial dan solidaritas kemanusiaan. Dalam konteks penelitian ini, Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dipandang sebagai salah satu bentuk implementasi nilai-nilai kesejahteraan dalam ekonomi syariah, karena bertujuan membantu

keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan kualitas hidup, serta mengurangi tingkat kemiskinan secara berkelanjutan. Dengan demikian, pelaksanaan PKH sejalan dengan prinsip ekonomi syariah yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan umat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir masih menunjukkan angka yang relatif signifikan, meskipun cenderung mengalami penurunan secara bertahap. Namun demikian, terdapat disparitas antarwilayah, di mana Provinsi Aceh masih termasuk dalam kategori daerah dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa permasalahan kemiskinan tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga memiliki karakteristik lokal yang memerlukan penanganan secara spesifik dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tidak hanya bersifat umum, tetapi juga mampu menjangkau kondisi riil masyarakat di tingkat daerah guna meningkatkan kesejahteraan secara merata.

Berdasarkan data tingkat kemiskinan tahun 2025, kondisi kemiskinan di Kota Lhokseumawe masih menunjukkan adanya masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan tercatat sebesar 9,01 persen, yang berarti masih terdapat penduduk yang mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup lainnya. Meskipun angka tersebut menunjukkan adanya penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, kondisi ini tetap menjadi perhatian karena mencerminkan bahwa kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya merata.

Selain itu, indeks kedalaman kemiskinan sebesar 1,37 menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran masyarakat miskin masih berada di bawah garis kemiskinan. Hal ini menggambarkan bahwa penduduk miskin di Kota Lhokseumawe masih menghadapi kesulitan dalam mencapai standar hidup minimum yang layak. Sementara itu, indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,33 menunjukkan adanya ketimpangan kondisi ekonomi di antara masyarakat miskin, di mana terdapat kelompok masyarakat yang berada pada tingkat kemiskinan yang lebih berat dibandingkan kelompok lainnya.

Adapun garis kemiskinan Kota Lhokseumawe pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp529.671 per kapita per bulan. Artinya, masyarakat yang memiliki tingkat pengeluaran di bawah jumlah tersebut dikategorikan sebagai penduduk miskin. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan di Kota Lhokseumawe masih memerlukan perhatian serius melalui berbagai kebijakan dan program sosial yang tepat sasaran. Oleh karena itu, keberadaan program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi penting dalam membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, khususnya keluarga penerima manfaat, agar mampu memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan (Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe, 2024).

Kondisi ini mengonfirmasi bahwa permasalahan kemiskinan di Lhokseumawe tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga memerlukan intervensi kebijakan yang lebih terarah, berbasis data lokal, dan sensitif terhadap karakteristik sosial-ekonomi masyarakat setempat.

Urgensi pendekatan syariah menjadi semakin relevan di Provinsi Aceh yang

menerapkan Qanun Zakat dan berlandaskan syariat Islam. Meskipun telah memiliki instrumen filantropi Islam seperti zakat, tingkat kemiskinan di Aceh masih tinggi, mengindikasikan perlunya sinergi antara program pemerintah (PKH) dengan prinsip maqasid syariah untuk memastikan keadilan distributif (al-'adalah) dan kemaslahatan umat (maslahah) (Rahman & Hidayat, 2024). Oleh karena itu, evaluasi implementasi PKH di wilayah ini tidak hanya penting secara empiris, tetapi juga strategis dalam konteks pembangunan ekonomi syariah daerah yang berorientasi pada falah. (Fitria, 2025)

Kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai program telah diimplementasikan, seperti bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, antara lain ketidaktepatan sasaran, keterbatasan koordinasi, dan belum optimalnya efektivitas program. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam aspek implementasi agar tujuan penanggulangan kemiskinan dapat tercapai secara lebih efektif dan tepat sasaran. (Eri Hariyanto, 2023)

Khususnya di Aceh yang berbasis syariah, belum ada studi yang secara spesifik mengkaji apakah implementasi PKH di wilayah pesisir sudah selaras dengan prinsip maqasid syariah, terutama dalam aspek pemeliharaan harta (hifz al-mal) melalui peningkatan kesejahteraan ekonomi nelayan .

Meskipun berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki kontribusi positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada analisis secara

umum atau pada wilayah perkotaan. Sementara itu, kajian yang secara spesifik menganalisis implementasi PKH di tingkat desa, khususnya di wilayah pesisir seperti Desa Ujong Blang, masih relatif terbatas. Padahal, karakteristik sosial ekonomi masyarakat pesisir memiliki perbedaan yang cukup signifikan dibandingkan dengan wilayah perkotaan, terutama dalam hal stabilitas pendapatan, akses terhadap sumber daya, serta tingkat kerentanan terhadap kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih mendalam untuk mengkaji implementasi PKH dalam konteks lokal serta dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga penerima manfaat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan penelitian (*research gap*) sekaligus memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih tepat sasaran.

Urgensi penelitian di wilayah pesisir seperti Desa Ujong Blang menjadi semakin kritis mengingat karakteristik sosial-ekonomi masyarakatnya yang jauh berbeda dengan wilayah perkotaan yang menjadi fokus sebagian besar studi sebelumnya. Masyarakat pesisir umumnya bergantung pada sektor perikanan dengan pola pendapatan yang musiman, tidak stabil, dan sangat rentan terhadap faktor cuaca serta ketersediaan hasil tangkapan. Sementara penelitian di wilayah perkotaan cenderung menunjukkan efektivitas PKH yang tinggi karena akses ekonomi yang lebih tetap, hasil tersebut belum tentu relevan jika diterapkan pada konteks nelayan tradisional yang menghadapi kerentanan struktural berbeda. Ketidadaan studi spesifik yang mengkaji implementasi PKH dalam konteks sosial-ekonomi masyarakat pesisir di Lhokseumawe menciptakan kesenjangan empiris

(*empirical gap*) yang perlu segera diisi agar kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat dirancang lebih kontekstual dan efektif.(Nugroho & Warningsih, 2020).

Salah satu permasalahan dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) adalah ketidaktepatan dalam penetapan sasaran penerima manfaat. Hal ini disebabkan oleh kurang optimalnya pembaruan data serta keterbatasan dalam proses verifikasi dan validasi, sehingga menimbulkan inclusion error dan exclusion error. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akurasi data sangat menentukan keberhasilan program. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan melalui pemutakhiran data secara berkala, peningkatan kapasitas aparatur, serta pemanfaatan teknologi informasi agar program PKH dapat berjalan lebih tepat sasaran dan efektif dalam menanggulangi kemiskinan. (Sleman, 2024).

Dalam konteks pembangunan daerah, keberhasilan program penanggulangan kemiskinan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi mata pencaharian, tingkat pendidikan, maupun akses terhadap sumber daya ekonomi. Perbedaan karakteristik tersebut menyebabkan implementasi kebijakan sosial tidak dapat disamaratakan, melainkan harus disesuaikan dengan kondisi lokal agar lebih efektif dan tepat sasaran. Oleh karena itu, implementasi kebijakan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) perlu dianalisis secara kontekstual guna mengetahui sejauh mana program tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat di tingkat lokal serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga penerima manfaat (Nugroho & Warningsih, 2020).

Permasalahan ketidaktepatan sasaran dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi salah satu faktor yang menyebabkan program bantuan sosial belum sepenuhnya mampu menurunkan tingkat kemiskinan secara optimal di Desa Ujong Blang. Dalam praktiknya, masih ditemukan masyarakat yang seharusnya layak menerima bantuan namun belum terdaftar sebagai penerima manfaat, sementara terdapat pula penerima yang kondisi ekonominya sudah relatif membaik tetapi masih menerima bantuan PKH. Kondisi ini terjadi akibat belum optimalnya proses pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), kurangnya verifikasi dan validasi data, serta keterbatasan koordinasi antara pemerintah desa, pendamping PKH, dan pihak terkait lainnya. Akibatnya, bantuan sosial yang seharusnya difokuskan kepada masyarakat miskin dan rentan belum sepenuhnya tepat sasaran.

Tingginya tingkat kemiskinan di Desa Ujong Blang juga dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sebagian besar bekerja pada sektor informal dan perikanan tradisional. Mata pencaharian tersebut sangat bergantung pada kondisi cuaca, musim, dan hasil tangkapan laut, sehingga pendapatan masyarakat cenderung tidak stabil. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan akses modal usaha, serta kurangnya peluang kerja yang memadai menyebabkan sebagian masyarakat masih mengalami kesulitan dalam meningkatkan taraf hidupnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh rendahnya pendapatan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor struktural dan keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi.

Dalam konteks kesejahteraan masyarakat, kondisi masyarakat Desa Ujong Blang belum sepenuhnya dapat dikategorikan sejahtera. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya masyarakat yang mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan ekonomi rumah tangga. Dalam penelitian ini, kesejahteraan masyarakat dibahas melalui beberapa indikator, yaitu tingkat pendapatan, pendidikan, dan kesehatan. Pendapatan menjadi indikator utama karena mencerminkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pendidikan juga menjadi indikator penting karena berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia dan peluang memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Selain itu, kesehatan mencerminkan kemampuan masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan sosial secara optimal. Ketiga indikator tersebut menjadi ukuran dalam menilai sejauh mana tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga penerima manfaat PKH di Desa Ujong Blang.

Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan keluarga miskin dan rentan yang telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memenuhi komponen tertentu yang telah ditetapkan pemerintah. Penerima bantuan tersebut meliputi keluarga yang memiliki anak usia dini, anak sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA, ibu hamil, lanjut usia, serta penyandang disabilitas berat. Dengan adanya kategori tersebut, program PKH diharapkan mampu membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar, khususnya pada bidang pendidikan dan kesehatan.

Pemanfaatan bantuan PKH pada dasarnya diarahkan untuk mendukung kebutuhan pendidikan anak, pemenuhan gizi keluarga, biaya kesehatan, serta kebutuhan pokok rumah tangga. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan sebagian masyarakat yang menggunakan bantuan tersebut untuk kebutuhan lain di luar ketentuan program akibat tekanan ekonomi yang dihadapi. Meskipun demikian, secara umum bantuan PKH dinilai cukup membantu masyarakat dalam mengurangi beban pengeluaran rumah tangga dan meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan.

Penentuan penerima PKH dilakukan berdasarkan data DTKS yang kemudian diverifikasi oleh pemerintah daerah dan pendamping sosial. Proses penetapan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga, kepemilikan komponen bantuan, serta tingkat kerentanan sosial masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala seperti data yang belum diperbarui secara berkala, kurangnya pengawasan, dan adanya perubahan kondisi ekonomi masyarakat yang menyebabkan ketidaksesuaian data penerima bantuan.

Oleh karena itu, untuk melihat apakah Program Keluarga Harapan (PKH) telah tepat sasaran, perlu dilakukan analisis terhadap kondisi riil masyarakat penerima manfaat di lapangan. Ketepatan sasaran dapat dilihat dari kesesuaian antara kondisi ekonomi penerima dengan kriteria masyarakat miskin yang telah ditetapkan pemerintah, serta sejauh mana bantuan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga penerima manfaat. Dengan demikian, evaluasi terhadap implementasi PKH menjadi penting untuk mengetahui efektivitas program

dalam membantu masyarakat miskin serta sebagai bahan perbaikan kebijakan sosial agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, permasalahan kemiskinan tidak hanya dipandang sebagai persoalan rendahnya pendapatan masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan ketidakmerataan distribusi kesejahteraan, keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, serta belum optimalnya pelaksanaan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Islam memandang bahwa kesejahteraan harus dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat melalui prinsip keadilan, tolong-menolong, dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, keberadaan program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) sejalan dengan tujuan ekonomi Islam dalam mewujudkan kemaslahatan dan meningkatkan kesejahteraan umat (Nugroho & Warningsih, 2020).

Permasalahan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran PKH di Desa Ujong Blang juga dapat dikaji dalam perspektif ekonomi Islam, khususnya berkaitan dengan prinsip keadilan distributif. Dalam Islam, bantuan kepada masyarakat miskin harus diberikan kepada pihak yang benar-benar berhak agar tercipta keseimbangan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Ketika bantuan sosial tidak tepat sasaran, maka tujuan keadilan sosial dalam Islam belum sepenuhnya tercapai. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Hasyr ayat 7 yang menekankan bahwa harta tidak boleh hanya beredar di kalangan orang-orang mampu, tetapi juga harus didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan demikian, ketepatan sasaran penerima PKH menjadi hal penting agar program tersebut benar-

benar mampu membantu masyarakat miskin dan rentan secara ekonomi (Rahmawati et al., 2022).

Tingginya tingkat kemiskinan di Desa Ujong Blang juga menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar kehidupan. Dalam ekonomi Islam, kesejahteraan tidak hanya diukur dari aspek materi semata, tetapi juga mencakup terpenuhinya kebutuhan dasar manusia secara menyeluruh, seperti pangan, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan keberlangsungan hidup yang layak. Oleh karena itu, masyarakat dapat dikatakan sejahtera apabila mampu memenuhi kebutuhan hidup secara layak, memiliki akses pendidikan dan kesehatan yang baik, serta terbebas dari kondisi ekonomi yang menimbulkan kesulitan dan ketergantungan berkepanjangan (Siregar & Nasution, 2021).

Indikator kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam juga berkaitan dengan konsep maqashid syariah, yaitu menjaga agama (hifz ad-din), menjaga jiwa (hifz an-nafs), menjaga akal (hifz al-‘aql), menjaga keturunan (hifz an-nasl), dan menjaga harta (hifz al-mal). Dalam konteks penelitian ini, indikator kesejahteraan masyarakat dapat dilihat melalui kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan pangan dan ekonomi rumah tangga, akses pendidikan anak, kondisi kesehatan keluarga, serta kemampuan mempertahankan kehidupan yang layak dan bermartabat. Dengan demikian, kesejahteraan dalam ekonomi Islam tidak hanya menekankan pada peningkatan pendapatan, tetapi juga kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh (Fadillah & Karim, 2023).

Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dalam perspektif ekonomi Islam termasuk kelompok masyarakat yang berhak memperoleh bantuan sosial karena berada dalam kondisi lemah secara ekonomi. Mereka meliputi keluarga miskin yang memiliki anak sekolah, anak usia dini, ibu hamil, lanjut usia, dan penyandang disabilitas. Dalam Islam, membantu kelompok masyarakat tersebut merupakan bentuk tanggung jawab sosial dan implementasi nilai solidaritas antarumat manusia. Hal ini juga diperkuat dalam QS. Al-Baqarah ayat 177 yang menjelaskan pentingnya memberikan bantuan kepada masyarakat miskin dan kelompok yang membutuhkan sebagai bagian dari nilai kebajikan dan keimanan (Hidayat & Fauziah, 2021).

Pemanfaatan bantuan PKH pada dasarnya bertujuan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok rumah tangga. Dalam ekonomi Islam, pemanfaatan bantuan sosial harus diarahkan pada hal-hal yang bersifat produktif dan memberikan kemaslahatan bagi keluarga penerima manfaat. Bantuan yang diterima diharapkan tidak hanya digunakan untuk konsumsi sesaat, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas hidup keluarga, seperti mendukung pendidikan anak dan menjaga kesehatan keluarga agar tercipta kesejahteraan yang berkelanjutan (Maulana & Fitriani, 2024).

Sementara itu, penentuan penerima PKH harus dilakukan secara adil, transparan, dan berdasarkan kondisi ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Dalam perspektif ekonomi Islam, keadilan merupakan prinsip utama dalam distribusi bantuan sosial. Oleh karena itu, proses pendataan dan penetapan penerima bantuan harus dilakukan secara jujur dan objektif agar tidak menimbulkan kecemburuan

sosial maupun ketimpangan di tengah masyarakat. Ketepatan sasaran program PKH dapat dilihat dari sejauh mana bantuan tersebut diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan mampu memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga penerima manfaat. Dengan demikian, implementasi PKH yang tepat sasaran akan sejalan dengan tujuan ekonomi Islam dalam menciptakan keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, dan kemaslahatan bagi masyarakat (Pratama & Sari, 2023).

Kondisi sosial ekonomi masyarakat di Desa Ujong Blang, Kota Lhokseumawe, Aceh, mencerminkan karakteristik khas wilayah pesisir, di mana sebagian besar penduduk menggantungkan mata pencaharian pada sektor perikanan, buruh harian, serta usaha mikro skala kecil. Ketergantungan pada sektor tersebut menyebabkan pendapatan masyarakat cenderung tidak stabil, terutama bagi nelayan tradisional yang dipengaruhi oleh faktor cuaca, musim, dan hasil tangkapan. Akibatnya, sebagian masyarakat masih berada pada kategori ekonomi menengah ke bawah dan belum mencapai tingkat kesejahteraan yang memadai.

Berdasarkan data kependudukan desa, jumlah penduduk Desa Ujong Blang tercatat sebanyak 5.725 jiwa yang terdiri atas 2.742 penduduk laki-laki dan 2.983 penduduk perempuan, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.598 KK. Jumlah penduduk yang cukup besar tersebut menunjukkan bahwa Desa Ujong Blang memiliki tingkat kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat yang relatif tinggi. Selain itu, tingginya jumlah kepala keluarga juga mencerminkan besarnya kebutuhan masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, serta akses terhadap lapangan pekerjaan yang layak.

Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat pesisir yang sebagian besar menggantungkan hidup pada sektor perikanan dan pekerjaan informal dengan tingkat pendapatan yang tidak menentu. Ketidakstabilan pendapatan tersebut menyebabkan sebagian masyarakat masih berada pada kondisi ekonomi yang rentan dan berisiko mengalami kemiskinan. Oleh karena itu, keberadaan Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi penting sebagai salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, khususnya keluarga miskin dan rentan di wilayah Desa Ujong Blang, melalui bantuan sosial yang diharapkan mampu meringankan beban pengeluaran rumah tangga serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Tabel 1.1
Data Kependudukan Desa Ujong Blang

No	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	1.598 KK
2	Jumlah Penduduk	5.725 Jiwa
3	Jumlah Penduduk Laki-laki	2.742 Jiwa
4	Jumlah Penduduk Perempuan	2.983 Jiwa

Sumber : Kantor Geuchik Desa Ujong Blang, Data Kependudukan Desa Ujong Blang Tahun 2026

Selain faktor pendapatan, kondisi ini juga dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan yang berdampak pada terbatasnya peluang memperoleh pekerjaan yang lebih layak. Di sisi lain, akses terhadap sumber daya ekonomi seperti modal usaha, teknologi, dan informasi pasar masih relatif terbatas, sehingga menghambat peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Desa Ujong Blang masih menghadapi berbagai

tantangan struktural yang menyebabkan kerentanan terhadap kemiskinan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, keberadaan program bantuan sosial pemerintah menjadi penting sebagai bentuk intervensi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat serta mengurangi tingkat kerentanan tersebut .(Nugraha, 2023).

Berdasarkan data awal yang diperoleh dari kantor keuchik desa ujong blang ,jumlah keluarga peneima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ujong Blang tercatat sebanyak 389 keluarga. Dari hasil *pra-survey* yang dilakukan terhadap beberapa informan, diperoleh gambaran bahwa pelaksanaan program telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal.

Berdasarkan data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) periode Oktober–Desember 2025 di Desa Ujong Blang, tercatat sebanyak 389 keluarga terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Data tersebut menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki peran yang cukup penting dalam membantu masyarakat yang tergolong miskin dan rentan secara ekonomi di wilayah desa. Penerima bantuan PKH terdiri dari berbagai kategori komponen bantuan, seperti anak usia dini (AUD), anak sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA, lansia, serta penyandang disabilitas.

Berdasarkan data tersebut, komponen penerima bantuan didominasi oleh kategori anak sekolah dasar (SD) sebanyak 520 penerima, diikuti kategori lansia sebanyak 202 penerima, anak tingkat SMP sebanyak 190 penerima, dan anak tingkat SMA sebanyak 180 penerima. Selain itu, terdapat juga 152 penerima kategori anak usia dini (AUD) dan 12 penerima kategori disabilitas. Data ini

menunjukkan bahwa fokus utama bantuan PKH di Desa Ujong Blang masih diarahkan pada peningkatan akses pendidikan dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan dalam Masyarakat.

Besarnya jumlah penerima manfaat tersebut menggambarkan bahwa masih terdapat masyarakat yang membutuhkan dukungan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan sehari-hari. Program PKH tidak hanya berfungsi sebagai bantuan tunai semata, tetapi juga menjadi bentuk intervensi pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Oleh karena itu, keberadaan PKH di Desa Ujong Blang diharapkan mampu membantu mengurangi beban ekonomi masyarakat miskin serta meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat secara berkelanjutan.

Salah satu penerima manfaat menyatakan bahwa bantuan PKH sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan dasar, terutama pendidikan anak dan kebutuhan rumah tangga, meskipun dalam kondisi tertentu masih digunakan untuk kebutuhan lain karena keterbatasan ekonomi. Sementara itu, pendamping PKH mengungkapkan bahwa masih terdapat kendala dalam implementasi program, seperti rendahnya pemahaman masyarakat terkait kewajiban serta belum optimalnya pembaruan data, yang berdampak pada ketidaktepatan sasaran penerima manfaat.

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ujong Blang merupakan bentuk intervensi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan kepada keluarga penerima manfaat yang

terdaftar dalam DTKS. Program ini tidak hanya memberikan bantuan tunai, tetapi juga melibatkan pendamping sosial untuk memastikan pemenuhan kewajiban di bidang pendidikan dan kesehatan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala seperti ketidaktepatan sasaran, rendahnya pemahaman masyarakat, serta hambatan administratif. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan agar program dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.. (Sleman, 2024).

.Berdasarkan berbagai permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), terlihat bahwa masih terdapat kesenjangan antara tujuan program dengan kondisi implementasi di lapangan. Ketidaktepatan sasaran, rendahnya pemahaman masyarakat, serta belum optimalnya pemanfaatan bantuan menunjukkan bahwa efektivitas program masih perlu dikaji secara lebih mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan analisis yang komprehensif terkait implementasi PKH, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga penerima manfaat di tingkat desa. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi perbaikan kebijakan sosial di masa yang akan datang.(Daely et al., 2025).

Berdasarkan observasi awal dari hasil wawancara dengan salah satu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan di Desa Ujong Blang, yaitu **Ibu Fitriani** (46 tahun), pada tanggal 11 Februari 2026.

Menurut Ibu **Fitriani** selaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM), menyatakan bahwa Program Keluarga Harapan sangat membantu keluarganya

dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama untuk kebutuhan pendidikan anak dan kebutuhan pokok rumah tangga. Bantuan yang diterima mampu meringankan beban ekonomi keluarga, khususnya ketika pendapatan suami sebagai nelayan tidak menentu. Namun demikian, beliau mengungkapkan bahwa bantuan PKH belum sepenuhnya mampu meningkatkan kondisi ekonomi keluarga karena jumlah bantuan yang diterima masih terbatas dan terkadang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lain yang bersifat mendesak.

Wawancara juga dilakukan dengan Ibu **Suniyati Yunus** (49 tahun) selaku Ketua Kelompok Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Ujong Blang pada tanggal 11 Februari 2026.

Menurut Ibu **Suniyati Yunus**, pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ujong Blang secara umum telah berjalan sesuai dengan ketentuan pemerintah. Akan tetapi, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti belum optimalnya proses pemutakhiran data Keluarga Penerima Manfaat (KPM), masih adanya masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan tetapi belum terdaftar, serta masih terdapat penerima bantuan yang kondisi ekonominya telah mengalami perubahan namun masih tercatat sebagai penerima Program Keluarga Harapan. Selain itu, beliau menjelaskan bahwa pendamping PKH secara rutin melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendampingan kepada keluarga penerima manfaat agar bantuan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan program, terutama untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang bertujuan mengetahui bagaimana implementasi

Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga penerima manfaat di Desa Ujong Blang. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam perspektif ekonomi syariah sehingga dapat diketahui sejauh mana pelaksanaan program telah mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, amanah, kemaslahatan, dan kesejahteraan dalam Islam. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul penelitian **"Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Penerima Manfaat (Studi Kasus di Desa Ujong Blang Kota Lhokseumawe)."**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ujong Blang Kota Lhokseumawe, Dalam Perspektif Ekonomi Syariah ?
2. Bagaimana tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga penerima manfaat (KPM) PKH di Desa Ujong Blang, Dalam Perspektif Ekonomi Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ujong Blang Kota Lhokseumawe.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga penerima manfaat (KPM) PKH di Desa Ujong Blang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoretis maupun praktis sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ekonomi pembangunan dan ekonomi syariah yang berkaitan dengan kebijakan sosial dan program bantuan pemerintah. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkaya kajian akademik mengenai implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) serta hubungannya dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga penerima manfaat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa, terutama yang berkaitan dengan efektivitas program penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), khususnya dalam hal ketepatan sasaran, pengawasan, dan keberlanjutan program.

1.4.2.2 Bagi Pemerintah Desa (Desa Ujong Blang)

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah desa dalam mendukung pelaksanaan PKH di tingkat lokal, terutama dalam hal pendataan masyarakat, sosialisasi program, serta koordinasi dengan pendamping PKH agar program berjalan lebih optimal.

1.4.2.3 Bagi Pendamping PKH

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pendamping sosial dalam meningkatkan kualitas pendampingan, edukasi, serta pengawasan terhadap keluarga penerima manfaat agar bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan sesuai tujuan program.

1.4.2.4 Bagi Masyarakat/Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya KPM, mengenai tujuan dan manfaat PKH sehingga dapat meningkatkan kesadaran dalam memanfaatkan bantuan secara produktif untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga.

1.4.2.5 Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan program bantuan sosial, implementasi kebijakan publik, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.